RENCANA KERJA
TAHUN 2020

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 ini adalah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan, dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2020 dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi. Renja tahun 2020 memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaanya yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam mengemban visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil WaliKota Bekasi terpilih yang dilantik pada tanggal 20 September 2018 untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Bekasi 2018–2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, dan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut, perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, salah satunya adalah Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama *MDGs* yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dipandang sebagai bagian penting dari Pembangunan Nasional, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dan

dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang kita lakukan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermartabat. Melalui kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemasyarakatan dan permasalahan pemberdayaan menjadi suatu budaya di masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam mencapai tingkat kesejahteraannya yang tinggi dan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh.

Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat partisipatif, akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selanjutnya dibina secara berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi dari masing-masing SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA).

Walikota/Wakil Walikota terpilih telah menuangkan visi baru untuk Kota Bekasi yaitu:

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Penetapan visi tersebut di samping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders)* yang ada di Kota Bekasi Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikan pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat*** untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat menyangkut pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Mengingat pentingnya Renja tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi merasa perlu untuk meyusun Renja SKPD yang akan menjadi dasar dalam implementasi program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2020 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

14. Peraturan pemerintah Repulik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Rebulik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan pemerintah Rebulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah (Lembaga Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan pemerintah Repulik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.
33. Peraturan Menteri PP& PA Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

39. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

42. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);

44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 TAhun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

46. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);

48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

49. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri A);

50. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan kegiatan Dinas PPPA untuk periode satu tahun 2020. Sedangkan tujuannya adalah :

1. memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakana oleh Dinas PPPA pada tahun 2018;
3. sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas PPPA dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA;
4. memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Badan P3AKB yang terdahulu dengan Dinas PPPA Kota Bekasi saat ini.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas PPPA tahun 2020 disusun dengan sistematika sbb :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

2. Bab 2 (dua) menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PPPA KOTA BEKASI

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PPPA KOTA BEKASI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Berikut tabel tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d Agustus 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)	Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
22.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan telepon (rekening)	72	60	72	49	68.06%	72	181	251.39%
		Tersedianya jasa pelayanan listrik (rekening)	84	33	84	49	58.33%	84	166	197.62%
		Tersedianya jasa pelayanan air (rekening)	12	12	12	7	58.33%	12	31	258.33%
2.2.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa/tenaga harian/borongan (orang)	84	8	84	56	66.67%	84	148	176.19%
		Tersedianya alat kebersihan kantor (Jenis)	161	8	161	0	0.00%	161	169	104.97%
2.2.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Tersedianya alat tulis kantor Dinas PPPA Kota Bekasi (Jenis)	26	57	26	26	100.00%	26	109	419.23%
2.2.1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan (lembar)	98740	111052	98740	49370	50.00%	98740	259162	262.47%
		Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa (Dokumen)	0	1	0	0	0.00%	0	1	0.00%

		Tersedianya barang cetakan (jenis)	11	12	11	11	100.00%	11	34	309.09%
2.2.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur (bahan bacaan)	3000	10	3000	2000	66.67%	3000	5010	167.00%
2.2.1.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai gula (kg)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai air mineral (gelas) (Dus)	475	72	475	0	0.00%	475	547	115.16%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai kopi (kg)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu snack (Dus)	556	164	556	30	5.40%	556	750	134.89%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai ai mineral (galon) (galon)	120	120	0	0	0.00%	0	120	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai teh (pak)	72	72	0	0	0.00%	0	72	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai snak kering (paket)	4	4	0	0	0.00%	0	4	100.00%
		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu makan (Box)	556	164	556	30	5.40%	556	750	134.89%
2.2.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi bagi aparatur (persen)	100	100	45	65	144.44%	45	210	210.00%
2.2.1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya aparatur tenaga kontrak kerja (orang)	156	11	156	104	66.67%	156	271	173.72%
2.2.1.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah advetorial (edisi)	20	15	20	14	70.00%	20	49	245.00%
		Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah iklan (iklan)	6	6	0	0	0.00%	0	6	100.00%
		Tersedianya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah talkshow (siar)	4	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2.2.1.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	197	0	197	0	0.00%	197	197	100.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
2.2.2.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor (unit)	18	21	18	18	100.00%	18	57	316.67%
2.2.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan personel komputer/notebook (unit)	10	4	10	5	50.00%	10	19	190.00%
		Tersedianya pemeliharaan printer (unit)	10	3	10	5	50.00%	10	18	180.00%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga bagi aparatur (stel)	48	45	0	0	0.00%	0	45	93.75%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
2.2.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Fasilitas pendidikan formal bagi aparatur (hari)	2	0	2	0	0.00%	2	2	100.00%
01.01.03.06	Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur	Kegiatan capacity building bagi aparatur (orang)	48	41	0	0	0.00%	0	41	85.42%

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan**	**100**	**100**	**100**	**70**	**70.00%**	**100**	**70**	**70.00%**
2.2.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku laporan LAKIP (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan LKPJ dan LPPD (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan RENSTRA (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan RENJA (Dokumen)	1	1	1	1	100.00%	1	3	300.00%
		Buku laporan evaluasi renja (Dokumen)	1	1	1	0	0.00%	1	2	200.00%
2.2.6.2	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunya laporan semester I, Laporan akhir tahun dan laporan bulanan (Dokumen)	14	14	3	2	66.67%	3	19	135.71%
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	**Tingkat Capaian kota Layak Anak**	**Utama**	**Madya**	**Madya**	**Nindya**	**Madya**	**Madya**	**Nindya**	**Nindya**
		Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100%	100	70	0.00%	100	171	171.00%
		Ratio KDRT (Ratio)	**1.400 : 1**	**1.470 : 1**	**1.270 : 1**	**0**	**0.00%**	**1.270 : 1**	**0**	**0.00%**
01.01.16.01	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	Terlaksananya peningkatan kompetensi bagi pendamping pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan (Orang)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
		Terlaksananya pembekalan bagi pengurus Forum Anak Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan (Orang)	200	200	0	0	0.00%	0	200	100.00%
		Terlaksananya lomba bagi pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan (Kecamatan)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%
01.01.16.03	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	Pelatihan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak (Orang)	300	300	0	0	0.00%	0	300	100.00%
		Pendampingan dan penanganan terhadap kasus anak (kasus)	100	100	0	0	0.00%	0	100	100.00%
'01.01.16.04	Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT	Terlaksananya pelatihan pendampingan pengurus P2TP2A dan masyarakat (Orang)	25	25	0	0	0.00%	0	25	100.00%
		Terlaksananya pendampingan kasus KDRT (Kasus)	65	65	0	0	0.00%	0	65	100.00%
		Terlaksananya pertemuan rutin P2TP2A (Orang)	45	45	0	0	0.00%	0	45	100.00%
		Tersedianya rumah aman (Unit)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
01.01.16.05	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak	Terpenuhinya operator telepon pengaduan (Persen)	100	100	0	0	0.00%	0	100	100.00%
		Terpenuhinya psikolog telepon pengaduan (Psikolog)	2	2	0	0	0.00%	0	2	100.00%
		Terpeliharanya website (Paket)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
		Tersosialisasinya TESA di sekolah (sekolah)	28	28	0	0	0.00%	0	28	100.00%
01.01.16.06	Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	Tersedianya sarana dan prasarana dan biaya operasional TPA (Paket)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
01.01.16.07	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018	Terselenggaranya lomba tari dan mewarnai anak (Kecamatan)	12	12	0	0	0.00%	0	12	100.00%

		Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 (Orang)	500	400	0	0	0.00%	0	400	80.00%
01.01.16.07	Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak	Terlaksananya sosialisasi sekolah ramah anak tingkat PAUD/TK dan SD (Sekolah)	24	24	0	0	0.00%	0	24	100.00%
		Terlaksananya sosialisasi ramah anak tingkat SMP dan SMA/SMK (Sekolah)	24	24	0	0	0.00%	0	24	100.00%
01.01.16.13	Pembinaan dan Implementasi 5 klaster Kota Layak Anak	Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan KLA malalui gugus tugas KLA (Orang)	40	40	0	0	0.00%	0	40	100.00%
		Terlaksananya pembinaan pengembangan KLA (Orang)	100	100	0	0	0.00%	0	100	100.00%
	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	**Prosentase Penuntasan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	**100%**	**0**	**100%**	**70**	**0.00%**	**100%**	**71**	**7100.00%**
2.2.17.1	Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus permasalahan anak	Pendampingan dan Penanganan terhadap kasus anak	0	0	100	82	82.00%	100	182	100.00%
		Tersedianya penanganan Psikolog terhadap kasus anak	0	0	16	8	50.00%	16	24	0.00%
		Sosialisasi Perlindungan Anak	0	0	9	9	100.00%	9	18	100.00%
		Tersedianya tenaga pendamping /pengawasan kasus permasalahan anak di Kota Bekasi	0	0	14	14	100.00%	14	28	100.00%
		Tersedianya pendampingan pengacara terhadap kasus anak	0	0	14	14	100.00%	14	28	100.00%
	Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	**Tingkat Capaian kota Layak Anak**	**0%**	**0**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100%**	**2**	**100.00%**
2.2.18.2	Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	0	0	2	2	100.00%	2	4	100.00%
		Terselenggaranya Jambore Forum Anak	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%
2.2.18.3	Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA)	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%
		Terselengggaranya aktivitas TPA di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%
	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	**Prosentase Penuntasan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**0**	**0**	**100**	**70**	**70.00%**	**70**	**140**	**0.00%**
2.2.19.1	Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus KDRT	Terlaksananya Pendampingan Kasus KDRT	0	0	18	45	250.00%	18	63	100.00%
		Terlaksananya Sewa Rumah Aman	0	0	1	1	100.00%	1	2	100.00%
	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak	**Ketersediaan data dan Informasi Gender dan Anak**	**0**	**0**	**100**	**70**	**100.00%**	**100**	**170**	**70.00%**
2.2.20.1	Penyelenggaraan Telepon Sahabat perempuan dan anak	Tersedianya Psikolog Telepon Pengaduan	0	0	2	2	100.00%	2	4	100.00%
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	**Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan (%)**	**0**	**21.84**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**21.84**	**0.00%**
		Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta (%)	**0**	**78.15**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**78.15**	**0.00%**
		Prosentase perempuan di DPRD Kota (%)	**0**	**16**	**0**	**0**	**0.00%**	**0**	**16**	**0.00%**
		Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	**49**	**38.74**	**100**	**38.57**	**38.57%**	**38.57**	**115.88**	**236.49%**

01.01.15.01	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terlaksananya sosialisasi program P2WKSS di lokasi binaan (Orang)	117	117	0	0	0.00%	0	117	100.00%
		Terlaksananya pembinaan dan penilaian P2WKSS (Lokasi)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
		Terlaksananya pelatihan di lokasi P2WKSS (kEGIATAN)	4	4	0	0	0.00%	0	4	100.00%
01.01.15.03	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Terselenggaranya pertemuan runtin PKK dan Pengajian PKK (Kali)	8	8	0	0	0.00%	0	8	100.00%
		Terselenggaranya lomba-lomba pada kegiatan PKK (Lomba)	3	3	0	0	0.00%	0	3	100.00%
01.01.15.04	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Terselenggaranya rangkaian kegiatan dan dukungan penilaian APE Tahun 2018 di Kota Bekasi (Kegiatan)	1	1	0	0	0.00%	0	1	100.00%
01.01.15.05	Pembinaan Organisasi Wanita	Terfasilitasinya kegiatan organisasi wanita (Bulan)	8	8	0	0	0.00%	0	8	100.00%
01.01.15.07	Pembentukan, Pembinaan, Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA	Terbentuknya kelompok PEKKA di kelurahan (Kelompok)	3	3	0	0	0.00%	0	3	100.00%
		Terselenggaranya pelatihan ekonomi produktif bagi PEKKA (oRANG)	40	40	0	0	0.00%	0	40	100.00%
	Program Pemberdayaan Perempuan	**Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan**	**49**	**38.74**	**100**	**38.57**	**38.57%**	**38.57**	**115.88**	**236.49%**
2.2.21.1	Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Pelatihan (TOT) Keterampilan bagi Kader P2WKSS	3	0	3	0	0.00%	3	3	100.00%
		Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi KK binaan	100	0	100	0	0.00%	100	100	100.00%
		Tersedianya perlengkapan penunjang pelatihan keterampilan	75	0	75	0	0.00%	75	75	100.00%
2.2.21.2	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	terselenggaranya kegiatan rutin PKK	11	0	11	7	63.64%	11	18	163.64%
		Tersusunnya Laporan Pelaksaan Kegiatan PKK Tahun 2019	1	0	1	1	100.00%	1	2	200.00%
		Penyusunan Rencana Kegiatan PKK Tahun 2020	1	0	1	1	100.00%	1	2	200.00%
		operasional pengurus PKK TK. Kota	12	0	12	1	8.33%	12	13	108.33%
2.2.21.3	Pembinaan Organisasi Wanita	Pertemuan Rutin GOW	8	0	8	1	12.50%	8	9	112.50%
		Sosialisasi Sekolah Perempuan	1	0	1	0	0.00%	1	1	100.00%
		Lomba Perempuan Inspiratif	12	0	12	0	0.00%	12	12	100.00%
		Seminar dalam rangka Hari Kartini	1	0	1	0	0.00%	1	1	100.00%
		Pertemuan Rutin DWP	8	0	8	3	37.50%	8	11	137.50%
		Pengajian Rutin DWP	8	0	8	3	37.50%	8	11	137.50%
		Seminar Dalam Rangka Hari Ibu	1	0	1	0	0.00%	1	1	100.00%
2.2.21.9	Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV)	Pelaksanaan Sekoper Cinta di Lokasi Binaan P2WKSS	100	0	100	100	100.00%	100	200	200.00%
		Pelatihan Keterampilan PEKKA	10	0	10	10	100.00%	10	20	200.00%
		Pengadaan Prasarana Kampung Ramah Anak	1	0	1	1	100.00%	1	2	200.00%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019, **per tanggal 30 Agustus 2019**, ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih dibawah 50%. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan dimana seharusnya dilaksanakan di Triwulan I dan II dijadwalkan kembali di Triwulan III dan IV dikarenakan adanya efisiensi/perubahan rencana realisasi anggaran sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi (Gaji, Tunjangan Daerah, dan Tunjangan Pegawai Berbasis Kinerja Perengkat Daerah) adalah sebesar Rp. 3.622.683.191,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.423.026.000,-

B. Belanja Langsung Non Urusan

Belanja Langsung Non Urusan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.580.857.925,- telah mencapai realisasi sebanyak 38.56% yaitu sebesar Rp. 609.508.750,- dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.313.071.225,- telah tercapai realisasi dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar 9.02% . Hal ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi sebesar 45%
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi sebesar 59.88%
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi sebesar 71.57%
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor belum terealisasi karena dianggarkan di Triwulan IV
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-Undangan belum dapat terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penyediaan bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan
7. Penyediaan Makan dan Minuman belum dapat terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk penyediaan makanan dan minuman

pegawai namun sudah terealisasi untuk fisik penyediaan makanan dan minuman untuk tamu sebesar 38.32

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah belum dapat terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk transportasi ke luar daerah
9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran dengan realisasi sebesar 60.67%
10. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum dapat terealisasi untuk keuangannya dikarenakan adanya perubahan jadwal proses pencairan namun untuk realisasi fisik telah mencapai 25% dengan dilaksanakannya kegiatan advertorial pada Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah terealisasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor belum dapat terealisasi dikarenakan adanya perubahan jadwal kegiatan untuk Triwulan III.
2. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi fisik sebesar 41.66% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.697.800,-

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari Pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal belum dapat terealisasi dikarenakan Kegiatan dilaksanakan disesuaikan dengan undangan untuk dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan formal dan Sampai saat ini belum ada undangan untuk pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur Dinas P3A Kota Bekasi.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari pagu sebesar Rp. 30.000.000,- belum dapat terealisasi namun kegiatan sudah berjalan sabanyak 70%. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran jadwal realisasi anggaran di Triwulan IV dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kegiatan telah dilaksanakan hingga bulan agustus namun realisasi anggaran mengalami pergeseran jadwal menjadi Triwulan IV.
2. Penyusunan Laporan Keuangan, kegiatan telah dilaksanakan hingga bulan agustus namun realisasi anggaran mengalami pergeseran jadwal menjadi Triwulan IV.

C. Belanja Langsung Urusan

Belanja Langsung Urusan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari 5 program, yaitu :

a. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 390.000.000,- untuk kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus permasalahan anak telah mencapai realisasi sebesar 66.66% dengan dilaksanakannya pendampingan kasus yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019.

b. Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- telah mencapai realisasi dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2019 telah dilaksanakan bekerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Pengembangan dan implementasi 5 klaster Kota Layak Anak dengan realisasi sebesar 56.97%

- Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA) dengan realisasi sebesar 66.63%
- Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Kota Layak Anak belum dapat terealisasi dikarenakan mengalami pergeseran jadwal menjadi Triwulan IV.

c. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- untuk kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus KDRT telah mencapai realisasi sebesar 66.66% dengan dilaksanakannya pendampingan kasus yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019.

d. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- untuk kegiatan Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak telah mencapai realisasi sebesar 33.33% dengan terpenuhinya psikolog untuk konsultasin Tesa yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019

e. Program Pemberdayaan Perempuan

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.327.000.000,- telah mencapai realisasi dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) belum dapat terealisasi dikarenakan mengalami pergeseran jadwal menjadi Triwulan IV.
2. Penyelenggaraan Kegiatan PKK dengan realisasi sebesar 66.66%
3. Pembinaan Organisasi Wanita dengan realisasi sebesar 24.99%
4. Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV) telah terealisasi sebesar 100% pada bulan Agustus 2019.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PPPA KOTA BEKASI

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan indikator Kinerja dan Target Pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (DPPPA) Kota Bekasi yang terdiri dari :

1. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan 100%;

   Dari target penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak sebesar 100%, **tahun 2017 dari total kasus anak dan KDRT berjumlah 403 kasus** dan tahun **2018 jumlah total kasus anak dan KDRT 204** kasus, yang didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakKota Bekasi telah terjadi penurunan kasus.

   Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersinergi, bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), dan P2TP2A

2. Rasio KDRT 1.470 RT : 1 Kasus;

   Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1000 rumah tangga. Untuk mengetahui berapa jumlah rumah tangga berbanding dengan kasus KDRT yang ada maka digunakan rumus pertama dan untuk mengetahui berapa jumlah kasus yang berbanding dengan rumah tangga Kota Bekasi digunakan kedua. Dari 2.689 Rumah Tangga Kota Bekasi terdapat 1 kasus KDRT. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa adanya penurunan kasus KDRT yang terjadi di Kota Bekasi.

   Dengan giatnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan dari Dinas PPPA Kota Bekasi mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak maka semakin meningkat pula pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Bekasi sehingga mereka yang menjadi korban telah mulai berani untuk terbuka melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada mereka. Dengan banyaknya pengaduan yang masuk pada Dinas PPPA Kota Bekasi menandakan masyarakat sudah lebih tanggap akan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun begitu, perlu ditegaskan kembali bahwa Dinas PPPA kota Bekasi merupakan fasilitator dan bukan problem solver.

3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak;

Pada tahun 2017, Kota Bekasi mendapat predikat Pratama dan kemudian meningkat pada tahun 2018 dengan mendapat predikat Madya dan di Tahun 2019 dengan terjadi peningkatan untuk predikat Kota Layak Anak, Kota Bekasi mendapat predikat Nindya dari target Madya dari lima kategori Kota Layak Anak yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak.

Peningkatan predikat Kota Layak Anak dari Madya menjadi Nindya dikarenakan :

a) Semakin bertambahnya jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk Kota Bekasi tahun 2016 hanya memiliki pengurus Forum Anak di Tingkat Kota dan Kecamatan. Namun, di Tahun 2017 terdapat 25 orang pengurus Forum Anak Tingkat Kota Bekasi, 96 Orang pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan dan 448 Orang pengurus Forum Anak Tingkat Kelurahan dari 56 Kelurahan.
b) Tersedianya fasilitas informasi layak anak, dimana Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak, yang biasa di singkat menjadi TESA. Di tahun 2016, TESA hanya berupa call center saja yang hanya memberikan layanan informasi. Namun, di tahun 2017 TESA telah terintegrasi dengan psikolog langsung dimana TESA adalah suatu bentuk layanan perlindungan perempuan dan anak melalui akses telepon untuk

masyarakat Kota Bekasi yang membutuhkan layanan informasi, konsultasi, konseling, rujukan dan layanan pengaduan apabila terjadi kekerasan.

Operator	(021) 8945 2119 (Jam kerja)
Konselor	0822 1000 0697
	0816 8484 78
Whatssap	0822 1000 0697
	0816 8484 79
Sms KPAI Kota Bekasi	0858 1184 4688

c) Telah tersedianya pojok ASI di Kantor Walikota Bekasi yang terdapat pada kantor Dinas PPPA Kota Bekasi ditahun 2016 dan kemudian di tahun 2017 meningkat tersedianya Pojok ASI di 12 Kecamatan Kota Bekasi dan pada tahun 2019 telah terdapat Pojok ASI pada Dinas Perkimtan;
d) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak dimana pada tahun 2016 Kota Bekasi hanya memiliki 5 Rumah Pintar namun di Tahun 2017, Rumah Pintar di Kota Bekasi telah mengalami peningkatan beserta sarana taman bermainnya di 7 Rumah pintar
e) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan dimana tahun 2017 dan tahun 2018 telah dilayani 100% dan untuk tahun 2019 telah terlayani sebesar 70% sampai bulan Agustus 2019;
f) Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan di tahun 2017, 2018 dan 2019 dimana di tahun 2016 belum ada sosialisasi pentingnya Sekolah Ramah Anak;
g) Dinas PPPA Kota Bekasi telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan mendapatkan dukungan dengan dikeluarkannya SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor 440/07/KESMAS tentang penetapan UPTD Puskesmas Ramah Anak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018, yaitu :

1. UPTD Puskesmas Rawa Tembaga;
2. UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
3. UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
4. UPTD Puskesmas Perumnas 2;
5. UPTD Puskesmas Karang Kitri;
6. UPTD Puskesmas Pejuang;
7. UPTD Puskesmas Jati Asih;
8. UPTD Puskesmas Jati Warna;
9. UPTD Puskesmas Kranji;
10. UPTD Puskesmas Jati Bening;
11. UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu

4. Partisipasi angkatan kerja perempuan 38.94%

Persentase capaian partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 berada pada posisi stagnan/tidak berubah dari tahun 2016. Hal ini dikarenakan baik BPS maupun Dinas Tenaga Kerja ataupun Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagai instansi yang mengeluarkan data belum mengeluarkan kembali data mengenai jumlah angkatan kerja perempuan.

Dengan target yang berubah di tahun 2019 dimana target pada tahun 2018 sebanyak 38.74% dan tahun 2019 target meningkat menjadi 38.94% sedangkan capaian tidak berubah maka di tahun 2019 capaian indikator partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi turun. Analisis capaian kinerja Pelayanan Dinas PPPA Kota Bekasi tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Predikat Kota Layak Anak	-	-	-	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Nindya	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0
2	Rasio KDRT	-	-	-	1270:1	1300 : 1	1325 : 1	1350 : 1	1400:1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	70	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0
7	Presentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	-	-	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0
8	Nilai AKIP	-	-	-	CC (60)	B (65)	B (69)	BB (75)	BB (79)	0	Pratama	Madya	Madya	Madya	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

*Update data baru akan diterima setelah Triwulan IV

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PPPA KOTA BEKASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mempunyai Fungsi :

1. Perumusan dan penerapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang.
4. Pembinaan administrasi perkantoran.
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas.
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya DPPPA menghadapi berbagai isu atau permasalahan sosial di masyarakat, Isu-isu didalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak;
2. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan;
3. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin);
4. Rendahnya kualitas hidup perempuan dan pendidikan politik perempuan serta kesejahteraan dan tumbuh kembang anak;
5. Belum terbangunnya mekanisme yang efektif untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
6. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS PPPA KOTA BEKASI

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan Serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi skpd dalam menyempurnakan renja skpd untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama.

Persandingan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD terlihat pada tabel sebagai berikut:

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAM KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan. Keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan di usulkan dari bawah keatas (BOTTOM – UP) maupun dari atas kebawah (TOP – DOWN) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir secara baik serta usulan tersebut dapat disesuaikan dengan penyelenggaraan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2019 yang diharapkan dapat ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volumen	Catatan
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan				
1	Sarana TP. PKK Kelurahan	PKK Kelurahan Mustikajaya	Bekasi JayaTerpenuhinya sarana dan prasarana TP. PKK Kelurahan 1 paket	1 Paket	
2	Pemberian Modal Kegiatan Posdaya	Kelurahan Cimuning	Tidak maksimalnya pembinaan Posdaya RW 5 Paket	5 paket	
3	Pembentukan Pembinaan Peletihan Ekonomi Produktif bagi PEKKA	Kec. Mustikajaya	Melatih Kelompok PEKKA 1 paket	1 paket	4 Kelompok (12 orang)
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu, Pembinaan Posyandu, Bimbingan Teknis untuk Kader Posyandu	Kec. Mustikajaya	Kurangnya sarana dan prasarana Posyandu 1 kegiatan	1 kegiatan	
			Strata Posyandu belum meningkat 2 kegiatan	2 kegiatan	
			Kurangnya pemahaman Posyandu 1 kegiatan	1 kegiatan	
			Belum optimalnya peran serta Pokjanal Posyandu dan PKP 1 kegiatan	1 kegiatan	

5	Pengendalian, monitoring, evaluasi dan penguatan kapasitas Posdaya	Kec. Mustikajaya	Kurang optimalnya pengelola kelembagaan / institusi 1 kegiatan	1 kegiatan	
6	Sosialisasi, Pelatihan/Pembekalan Workshop, Capacity Building Satgas Ramah Anak RT/RW	Kec. Mustikajaya	Penguatan Satgas Ramah Anak RT/RW 1 kegiatan	1 kegiatan	12 Kecamatan
7	Bantuan Sarana Prasarana Posyandu.,	Posyandu RW.005	Tersediannya Sarana Prasana Posyandu RW.005 1 Paket	1 Paket	
8	Pembentukan pembinaan Pelatihan ekonomi produktif bagi PEKKA	Kecamatan Bekasi Selatan	adanya pelatihan Kelompok PEKKA agar lebih optimal 4 Kelompok	4 kelompok	
9	Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu	Kecamatan Bekasi Selatan	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 1 Kegiatan	1 kegiatan	
10	Penyelenggaraan kegaiatan pokjanal Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan Kader Posyandu	Kecamatan Bekasi Selatan	diadakannya Bintek dan pembinaan Pokjanal dan Kader Posyandu dikecamatan Bekasi Selatan 1 Kegiatan	1 kegiatan	
11	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Kecamatan Bekasi Selatan	Adanya pengalokasian Anggaran bagi PKK Kecamatan dan Kelurahan 1 Kegiatan	1 kegiatan	
12	Peningkatan Peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Kecamatan Bekasi Selatan	adanya perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan dan diadakannya pelatihan ketrampilan dan pembinaan 1 kegiatan	1 kegiatan	

13	Pengendalian, monitoring, evaluasi dan penguatan Kapasitas Posdaya	Kecamatan Bekasi Selatan	Diadakannya Monev dan Bintek bagi Kader Posdaya dikecamatan Bekasi selatan 1 Kegiatan	1 kegiatan	
14	Pembangunan Gedung Posyandu RT 5 RW 5 Kelurahan Jatiwarna	RT 5 RW 5 Kelurahan Jatiwarna	Tersedianya Gedung Posyandu RT 5 RW 5 Kelurahan Jatiwarna yang representatif seluas 6 x 5 M	50,000,000	
15	Pembangunan Gedung Posyandu Jl. Kemuning RT 5 RW 6 Kelurahan Jatiwarna	RT 5 RW 5 Kelurahan Jatiwarna	Tersedianya Gedung Posyandu Jl. Kemuning RT 5 RW 6 Kelurahan Jatiwarna yang representatif seluas 7,5 x 4 M	75,000,000	
16	Renovasi Gedung Posyandu Gg Bersama RT 5 RW 1 Kel.Jatiwarna	Gg Bersama RT 5 RW 1 Kel.Jatiwarna	terbangunnya Prasarana gedung Posyandu Gg Bersama RT 5 RW 1 Kel.Jatiwarna yang representatif 35 M^2	50,000,000	
17	Pembangunan Gedung Posyandu RT 4 RW 3 Kelurahan Jatimurni	RT 4 RW 3 Kelurahan Jatimurni	Terbangunnya Gedung Posyandu RT 4 RW 3 Kelurahan Jatimurni yang representatif 70 M	1 unit	
18	Pembentukan Pembinaan PElatihan Ekonomi Produktif bagi PEKKA	1 Kecamatan, 4 Kelurahan	Melatih kelompok PEKKA (12 orang) 4 Kelompok	4 kelompok	Pemberdayaan PEKKA yang belum optimal
19	Pengadaan Sapras Posyandu	1 Kecamatan, 4 Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarpras Posyandu 1 kegiatan	1 kegiatan	Kurangnya Sarpras Posyandu
20	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Posyandu	1 Kecamatan, 4 Kelurahan	Terlaksananya pembinaan Posyandu 2 kegiatan	2 kegiatan	Strata Posyandu yang belum meningkat

21	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu tingkat Kota dan Pendampingan Kader Posyandu	1 Kecamatan, 4 Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Pokjanal dan Pendampingan Kader Posyandu serta bimbingan teknis 2 kegiatan	2 kegiatan	Belum optimalnya peran serta pokjanal posyandu dan PKP serta kurangnya pemehaman posyandu yang multifungsi
22	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	1 Kecamatan, 4 Kelurahan	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk kegiatan PKK 1 kegiatan	1 kegiatan	Kurang terfasilitasinya dukungan anggaran untuk PKK Kelurahan dan Kecamatan
23	Pemberdayaan PEKKA belum Optimal (DPPA)	Bekasi	Membentuk Pelatihan Ekonomi 0 12 Orang	12 orang	Melatih Kelompok PEKKA
24	Kurangnya Saran dan Prasarana Posyandu (DPPA)	Kota Bekasi	Posyandu 1 Kegiatan	1 kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
25	Strata Posyandu Belum Meningkat (DPPA)	Bekasi	Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu 2 Kegiatan	1 kegiatan	Pembinaan Posyandu
26	Kuranganya Pemahaman Posyandu Multi Fungsi (DPPA), Belum Optimal Peran Serta Pokjanal Posyandu & PKP	Bekasi	Penyelenggaran Pokjanal 1 Kegiatan	1 kegiatan	Bimbingan Teknis Pembinaan Pokjanal dan Pendamping Kader Posyandu
27	Kurangnya terfasilitasinya dukungan Anggaran untuk PKK Kecamatan dan Kelurahan (DPPA)	Bekasi	Penyelenggaraan PKK 1 Kegiatan	1 kegiatan	Pengalokasiaan Anggaran

28	Kurang Optimalnya Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (DPPA)	Bekasi	Perbaikan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1 Kegiatan	1 kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
29	Belum adanya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan lomba-lomba tingkat Kecamatan	PKK Kecamatan Jatisampurna	Lomba 10 Program PKK, Lomba balita sehat, Lomba KB sehat dan Lomba Posyandu 3 Kegiatan	3 posyandu	Untuk Memaksimalkan kegiatan lomba-lomba
30	Kurangnya sarana dan prasarana posyandu	RT 003 RW 006	Pengadaan 1 unit	1 unit	memfasilitasi alat musik Qosidah
31	Pembentukan Pembinaan Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA	Bantargebang	4 Kelompok (12 Orang) 1 Kegiatan	1 kegiatan	Pemberdayaan PEKKA Belum Optimal
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Bantargebang	Se-Kecamatan Bantargebang 1 Kegiatan	1 kegiatan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Posyandu
33	Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu	Bantargebang	Se-kecamatan Bantargebang 2 Kegiatan	2 kegiatan	Strata Posyandu Belum Meningkat
34	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Dan Pendampingan Kader Pos Yandu	Bantargebang	Se-Kecamatan Bantargebang 1 Kegiatan	1 kegiatan	Kurangnya Pemahaman Posyandu Yang Multifungsi dan Belum Optimalnya Peranserta Pokjanal Posyandu dan PKP
35	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Bantargebang	Se-Kecamatan Bantargebang 1 Kegiatan	1 kegiatan	Kurang Terpasilitasnya Dukungan Anggaran Untuk PKK Kecamatan dan

					Kelurahan
36	Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	Bantargebang	Se-Kecamata Bantargebang 1 Kegiatan	1 kegiatan	Kurang Optimalnya Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
37	Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya	Bantargebang	Se-Kecamatan Bantargebang	1 kegiatan	Kurang Optimalnya Pengelola Kelembagaan/Institusi
38	Sosialisasi, Pelatihan / Pembekalan Workshop capacity Building Satgas Ramah Anak RT/RW	Bantargebang	Kelurahan se-Kota Bekasi 12 Kecamatan 1 Kegiatan	1 kegiatan	Kekerasan-kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat
39	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Posyandu	KecamataN Pondok Melati	Terlaksananya Pembinaan Posyandu guna peningkatan Strata Posyandu sebanyak 1 Kegiatan	1 kegiatan	
40	Fasilitasi Kegiatan Pokjanal Posyandu dan PKP	Kecamatan Pondok Melati	Terselenggaranya pembinaan dan bimbingan teknis fungsi dan peran Posyandu, Pokjanal Posyandu dan PKP 1 Kegiatan	1 kegiatan	
41	Penyelengaraan Kagiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pondok Melati	Pengalokasian anggaran penunjang Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan 1 Kegiatan	1 kegiatan	
42	Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya	Kecamatan Pondok Melati	Optimalisasi Pengelola Kelembagaan Posdaya dengan melakukan monev dan peningkatan kapasitas pengelola Posdaya sebanyak 1 Kegiatan	50,000,000	

43	Pembinaan Pelatihan Ekonomi Produktif bagi Kelompok PEKKA di Kecamatan Pondok Melati	Kecamatan Pondok Melati	Melakukan pelatihan terhadap Kelompok PEKKA 4 Kelompok 12 Orang	100,000,000	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				
44	Bintek pengurus Forum anak	Kecamatan Bekasi Selatan	dioptimalkannya kepengurusan Forum anak di Kecamatan Bekasi Selatan 1 kegiatan	1 kegiatan	
45	Fasilitas Forum anak	Kecamatan Bekasi Selatan	dikuatkannya Forum anak 1 Kegiatan	1 kegiatan	
46	Sosialisasi, pelatihan/pembekalan workshop Capacity Building Satgas Ramah anak RT/RW	Rt/Rw Se-Kecamatan Bekasi Selatan	Dikuatkannya Satgas Ramah anak RT/RW di kecamatan Bekasi Selatan 1 Kecamatan	1 kecamatan	
47	Pelatihan/pembekalan pendampingan dan penanganan kasus	RT/RW Se-Kecamatan Bekasi selatan	Dikuatkannya Satgas ramah anak di RT/RW di Kecamatan Bekasi selatan 1 Kecamatan	1 kecamatan	
48	Kurang Optimalnya Pengelola Kelembangaan /Institusi (DPPA)	Bekasi	Monev dan Bimtek 1 Kegiatan	1 kegiatan	Mengendalikan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Pos Daya
49	Belum Semua Kecamatan di Kota Bekasi Untuk Rumah Pintar (DPPA)	Bekasi	Pembangunan Rumah Pintas di Kecamatan Pondok Melati, Bantar Gebang, Bekasi Barat Jatisampurna,	5 unit	Pengembangan Rumah Pintar

			Jatiasih 5 unit		
50	Forum Anak Belum Optimal (DPPA)	Bekasi 12 Kecamatan	Bintek Pengurus Forum Anak 1 Kegiatan	1 kegiatan	Penguatan Forum Anak
51	Forum Anak Belum Optimal (DPPA)	12 Kecamatan	Bintek Pengurus Forum Anak 1 Kegiatan	1 kegiatan	Fasilitasi Forum Anak
52	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat (DPPA)	Bekasi	Sosialisasi Penguatan Satgas Ramah Anak RT/RW 12 Kecamatan	12 kecamatan	Penguatan satgas Ramah Anak RT/RW
53	Bila Terjadi Kasus Kekerasan Terhapa Perempuan dan Anak tidak berani melaporkan (DPPA)	Bekasi	Pelatihan /Pembekalan 12 Kecamatan	12 kecamatan	Penguatan satgas Ramah Anak RT/RW
54	Belum Aktif Forum Anak	Kelurahan Jatiraden	1 KCP	1 KCP	Pembinaan Forum Anak Tingkat Kelurahan
55	Kurangnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Balita)	RT 006 RW 005	Bangunan 200 Meter	1 unit	Bangunan sarana Posyandu
56	Kurangnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Balita)	RT 006 RW 007	Bangunan Sarana Posyandu 1 Unit	1 unit	Renovasi Posyandu
57	Kurangnya Pelayanan Kesehatan (Balita)	RT 003 RW 008	Pengadaan Meubeleir 4 RT	4 RT	Pengadaan saran Posyandu
58	Kurangnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Balita)	RW 02dan RW 04	Bangunan Posyandu 2 Unit	2 unit	Sarana Posyandu

59	Pembinaan Aktif Forum Anak	Kelurahan Jatiraden	Pembinaan 1 KCP	1 kecamatan	Untuk Forum Anak
60	Pembangunan Rumah Pintar Di Kecamatan Bantargebang	Bantargebang	Se-Kecamatan Bantargebang 1 Unit	1 unit	Forum anak Belum Optimal
61	Bintek Pengurus Forum Anak	Bantargebang	Se-Kecamatan Bantargebang 1 Kegiatan	1 kegiatan	Forum anak Belum Optimal
62	Pasilitas Forum anak	Bantargebang	Se-Kecamatan Bantargebang 1 Kegiatan	1 kegiatan	Forum anak Belum Optimal
63	Belum memiliki kantor sekretariat Rw dan posyandu	Rt 003 Rw 01 kelurahan jatikarya	pembangunan kantor sekretariat Rw 01 0 Meter	1 unit	pembangunan kantor sekretariat Rw
64	Tidak Adanya Posyandu yang Memadai	RW 006	Pembangunan Posyandu 1 Unit	1 unit	Pembangunan Gedung Pos Yandu
65	Tidak layaknya Sarana Pendidikan Usia Dini	RT 003/006	Perbaikan Bagian bangunan Yang Rusak 1 Unit	1 unit	Renovasi Gedung Paud
66	Pembangunan Rumah Pintar	Perumahan Poris Kel. Jatirahayu	Terbangunnya Rumah Pintar di area Taman Perumahan/Permukiman 1 Unit	1 unit	Prioritas Utama
67	Pembangunan Gedung PKK Kelurahan Jatimelati	Kantor Kelurahan Jatimelati	Terbangunnya Gedung PKK Kelurahan 1 Unit	1 unit	Prioritas Utama
68	Renovasi Gedung Posyandu Sedap Malam Jl. H. Harun	Rt 4 RW 10	Terbangunnya prasarana gedung Posyandu 1 Unit	1 unit	Prioritas Utama
69	Fasilitasi Kegiatan dan Bintek	Kecamatan	Penguatan kapasitas pengurus Forum Anak Kelurahan	1 kegiatan	Prioritas Utama

	Pengurus Forum Anak	Pondok Melati	sebanyak 1 Kegiatan		
70	Peningkatan Kapasitas Satgas Ramah Anak RT/RW, dan Pendampingan serta Penanganan Kasus	Kecamatan Pondok Melati	Penguatan Peran Satgas Ramah Anak RT/RW dalam penanganan dan deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan anak 1 Kegiatan	1 kegiatan	
71	Pengadaan Sarana penunjang Kegiatan Posyandu	Kelurahan Jatimelati, Jatimurni, Jatiwarna, dan Jatirahayu	Terlaksananya pengadaan Sarana penunjang Kegiatan Posyandu sebanyak 4 Paket	4 paket	
72	Bintek Pengurus Forum Anak	1 Kecamatan	Terlaksananya penguatan forum anak 1 kegiatan	1 kegiatan	Forum anak yang belum optimal
73	Kegiatan Fasilitasi Forum Anak	1 kecamatan	Terlaksananya fasilitasi forum anak 1 kegiatan	1 kegiatan	Forum anak yang belum optimal
74	Sosialiasi Satgas Ramah RT/RW	1 Kecamatan, 4 Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Satgas Ramah anak RT/RW 1 kegiatan	1 kegiatan	Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
75	Pelatihan/Pembekalan, Pendampingan Penanganan Kasus terhadap Kasus Kekerasan perempuan dan anak	1 Kecamatan, 4 Kelurahan	Penguatan Satgas Ramah Anak RT/RW 1 Kegiatan	1 kegiatan	

BAB III
TUJUAN, SASARAN
DINAS PPPA KOTA BEKASI

3.1 TELAAH KEBIJAKKAN NASIONAL

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional bidang pemberdayaan perempuan terdiri dari pembangunan dengan fokus prioritas kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebijakan pengarusutamaan gender dan kebijakan lintas bidang perlindungan anak.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam bidang politik dan jabatan publik. Selain indikator IPG, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator *gender empowerment measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan

menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak mencakup setiap bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sasaran bidang perlindungan anak adalah meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan:

(a) meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak, serta menurunnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan;

(b) meningkatnya persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan

(c) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran yang dilakukan terhadap rumusan visi sebagai upaya penyederhanaan bagi pelaksanaan pencapaian visi melalui implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

memiliki keinginan kuat untuk mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2020 yaitu:

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat***.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), yaitu dengan tujuan:

1. Meningkatkan implementasi pemenuhan hak anak, dengan sasaran:
    - Terpenuhinya penyelesaian, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan target di tahun 2020 adalah sebesar 100%;
    - Tingkat Kualitas Pemenuhan hak anak, dengan target di tahun 2020 adalah dengan predikat Nindya untuk menuju Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

2. Meningkatkan peran serta dan Kualitas SDM perempuan, dengan sasaran:
    - Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan target di tahun 2020 adalah sebesar 49% dimana diharapkan dengan kegiatan dan program yang menunjang keaktifan dan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2020 terdiri dari:

I. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Program Ini didukung dengan kegiatan:

- Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan, dan
- Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan perlindungan khusus

II. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan, antara lain :

- Pengembangan dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak
- Biaya Operasional dan sarana pendukung tempat penitipan anak (TPA)
- Pengadaan Sarana pendukung Kota Layak Anak (KLA)
- Pengembangan Forum Anak

- Pembentukan dan pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

III. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus.

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain :

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

IV. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak

Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak

V. Program Pemberdayaan Perempuan

Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
- Penyelenggaraan Fasilitasi Posyandu
- Penyelenggaraan Kegiatan TP PKK
- Pembentukan Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Pelaku Usaha
- Pembinaan Organisasi Wanita
- Penyelenggaraan Sekoper Cinta
- Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- Rencana Aksi Daerah (RAD), PUG, dan PHA

Total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 7.054.100.000,-** berasal dari APBD Kota Bekasi;

Rumusan Program/kegiatan tersebut apabila tidak sesuai dengan rancangan baik jenis program, kegiatan maupun pagu indikatif akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang berdampak terhadap pencapaian Visi Misi Kota Bekasi.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KOTA BEKASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	-2	-4	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.02.2.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kota Bekasi	**100%**	1,374,100,000	APBD		**Persen**	1,549,000,000
2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan telepon, air dan listrik	Kota Bekasi	72 line; 84 rek listrik; 12 line PAM	40,000,000	APBD		Rekening	40,000,000

2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan dan bahan pembersih	Kota Bekasi	108 orang dan 9 jenis bahan pembersih	100,000,000	APBD		Orang	115,000,000
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Bekasi	53 jenis ATK	110,000,000	APBD		Jenis	110,000,000
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Bekasi	12 jenis cetakan	100,000,000	APBD		Jenis	100,000,000
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kota Bekasi	6 jenis komponen listrik	12,000,000	APBD		Jenis	12,000,000
2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kota Bekasi	50 eksemplar	30,000,000	APBD		Eksemplar	30,000,000

2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Bekasi	1000 dus	30,000,000	APBD		Dus	31,500,000
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Bekasi	45 orang	250,000,000	APBD		Orang	350,000,000
2.02.2.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga kontrak kerja	Kota Bekasi	156 orang	602,100,000	APBD		Orang	660,500,000
2.02.2.02.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya advetorial	Kota Bekasi	25 advetorial	100,000,000	APBD		Advetorial	100,000,000
2.02.2.02.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**Kota Bekasi**	**100%**	**230,000,000**	**APBD**		**Persen**	**287,000,000**

2.02.2.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kota Bekasi	6 mobil dan 12 motor	200,000,000	APBD		Kendaraan	257,000,000
2.02.2.02.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bekasi	60 unit	30,000,000	APBD		Unit	30,000,000
2.02.2.02.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Bekasi**	**100%**	**50,000,000**	**APBD**		**Persen**	**50,000,000**
2.02.2.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pendidikan aparatur DP3A	Kota Bekasi	45 orang	50,000,000	APBD		Orang	50,000,000
	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	**Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan**	**Kota Bekasi**	**100%**	**900,000,000**	**APBD**		**Persen**	**950,000,000**

2.2.15.1	Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Pendampingan dan penanganan terhadap kasus anak	Kota Bekasi	180 Orang	500,000,000	APBD		Orang	525,000,000
1.12.1.12.01.15.00	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pendampingan terhadap kasus anak; pendampingan kasus anak oleh pengacara; penanganan pemulihan psikologis korban oleh psikolog; monitoring dan pembinaan korban/pelaku dan keluarga; Pelatihan trauma healing	Kota Bekasi	100 kasus; 20 kasus; 62 anak/kasus; 12 kecamatan; 1 paket	400,000,000	APBD		Kasus	425,000,000
	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	**Tingkat Capaian Kota Layak Anak**	**Kota Bekasi**	**Nindya**	**1,250,000,000**	**APBD**		**Peringkat**	**3,550,000,000**
1.11.1.12.01.20	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	Terlaksananya pembekalan bagi pengurus forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; dan Terpenuhinya undangan peringatan dan keikutsertaan Kongres Anak Indonesia Tingkat Nasional	Kota Bekasi	24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamatan dan 168 tingkat kecamatan; 10 orang	150,000,000	APBD		Orang	350,000,000
1.11.1.12.01.20	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Terlaksananya pelatihan KHA bagi sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, PAUD Holistik, Kader BKB, Kader BKR, Kader posyandu, pengurus rumah pintar dan motekar	Kota Bekasi	150 orang	-	APBD		Orang	250,000,000

1.11.1.12.01.20	Peningkatan Kompetensi Masyarakat Melalui Parenting	Terlaksananya pelatihan parenting bagi kader Posyandu, Kader BKB, Kader BKR, dan Kader PKK	Kota Bekasi	150 orang	-	APBD		Orang	200,000,000
1.11.1.12.01.20.06	Pengembangan Dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	Terselenggaranya verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Pusat; Terselenggaranya rapat koordinasi tim gugus tugas Kota Layak Anak	Kota Bekasi	1 event; 2 kali	250,000,000	APBD		Event	250,000,000
1.11.1.12.01.20.06	Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Kota Layak Anak	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kota Layak Anak; Tersusunya pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2020	Kota Bekasi	12 Kecamatan; 1 dokumen	-	APBD		Kecamatan	200,000,000
1.11.1.12.01.20.06	Lomba Kota Layak Anak	Terselenggaran lomba Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Pintar KLA, Kecamatan Layak Anak dan Forum Anak	Kota Bekasi	5 Event	-	APBD		Event	400,000,000
1.11.1.12.01.20.06	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021	Terlaksananya peringatan HAN Kota Bekasi Tahun 2021; Terpenuhinya Undangan HAN Tingkat Provinsi dan Nasional	Kota Bekasi	500 orang; 2 event	-	APBD		Orang	200,000,000

1.11.1.12.01.20.12	Jambore Forum Anak Kota Bekasi	Terlaksananya Jambore Pengurus Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Kota Bekasi	24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamatan dan 112 tingkat kecamatan	-	APBD		Orang	300,000,000
1.11.1.12.01.20.06	Pengadaan Sarana KIE (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi) Kota Layak Anak	Terpasangnya spanduk, baliho, dan banner sebagai sarana KIE Kota Layak Anak; Tersedianya sarana fasilitas ruang menyusui dan taman bermain anak	Kota Bekasi	12 kecamatan; 80 lokasi	-	APBD		Kecamatan	350,000,000
2.02.2.02.01.18.12	Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Terlaksananya sosialisasi pembentukan dan pembinaan PUSPAGA	Kota Bekasi	150 orang/1 kali	200,000,000	APBD		Orang	200,000,000
2.02.2.02.01.18.02	Biaya Operasional Dan Sarana Pendukung Tempat Peniti[an Anak (TPA)	Tersedianya sarana prasarana dan biaya operasional TPA	Kota Bekasi	1 paket/1 tahun	350,000,000	APBD		Paket	350,000,000
2.02.2.02.01.18.05	Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak	Tersedianya Prasarana Kampung Ramah Anak, sarana rumah pintar, prasarana sekretariat forum anak Tingkat Kota Bekasi dan prasarana rumah pintar	Kota Bekasi	1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit	300,000,000	APBD		Paket	500,000,000

	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus.	**Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan**	**Kota Bekasi**	**100%**	**650,000,000**	**APBD**		**Persen**	**715,000,000**
2.02.2.02.01.19.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Terlaksananya pendampingan kasus KDRT; Terlaksananya pertemuan rutin; Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan bagi ASN dan Non ASN; Trauma Healing bagi pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan; pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Kota Bekasi	65 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 40 orang; 40 orang	500,000,000	APBD		Kasus	550,000,000
2.02.2.02.01.19.02	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terlaksananya sewa rumah aman	Kota Bekasi	1 unit	150,000,000	APBD		Unit	165,000,000
	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak	**Persentase Ketersediaan Data Gender Dan Anak**	**Kota Bekasi**	**100%**	**100,000,000**	**APBD**		**Persen**	**200,000,000**
1.11.1.12.01.20	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak	Tersosialisasinya Tesa di sekolah Kota Bekasi; Terpenuhinya Psikolog Telepon Pengaduan	Kota Bekasi	750 peserta; 2 orang/12 bulan	100,000,000	APBD		Orang	200,000,000
	Program Pemberdayaan Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Kota Bekasi**	**49%**	**2,500,000,000**	**APBD**		**Persen**	**3,011,720,000**

2.02.2.02.01.15.07	Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Pelaku Usaha	Terbentuknya kelompok PEKKA di kelurahan; Pembinaan dan monev perempuan pelaku usaha; Terselenggaranya pelatihan perempuan pelaku usaha	Kota Bekasi	4 kelompok; 12 kecamatan; 175 orang	300,000,000	APBD		Kecamatan	330,000,000
2.02.2.02.01.21.11	TOT Fasilitator dan Gender Champion	Terselenggarakannya rangkaian kegiatan pelatihan fasilitator dan gender champion	Kota Bekasi	135 orang	-	APBD		Orang	165,000,000
2.02.2.02.01.15.05	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Terselenggaranya rangkaian kegiatan dan dukungan penilaian APE tahun 2021 di Kota Bekasi, Terlaksananya kegiatan bimtekPPRG; Bimbingan tehnis PUG; Rapat koordinasi forum PUSPA; Tersedianya pedoman PUG Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen	150,000,000	APBD		Orang	165,000,000
2.02.2.02.01.21.03	Pembinaan Organisasi Wanita	Pertemuan rutin GOW; Seminar Perempuan politik; Lomba Perempuan Inspiratif; Seminar dalam rangka Hari Kartini; Pertemuan rutin DWP; Pengajian rutin DWP; Seminar dalam rangka Hari Ibu; Pelatihan public speaking	Kota Bekasi	11 kali; 2 kali; 12 kecamatan; 1 kali;11 kali; 11 kali; 1 kali; 3 kalii	250,000,000	APBD		Kecamatan	260,000,000
2.02.2.02.01.15.08	Penyelenggaraan Sekoper Cinta	Sosialisasi Sekoper Cinta Tingkat Kecamatan; TOT Sekoper Cinta; Penyelenggaraan Sekolah Sekoper Cinta	Kota Bekasi	12 kecamatan; 30 orang; 6 kecamatan	250,000,000	APBD		Kecamatan	275,000,000

2.02.2.02.01.21.02	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Operasional pengurus PKK Tingkat Kota; Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan PKK Tahun 2020; Penyusunan rencana kegiatan PKK Tahun 2021	Kota Bekasi	12 Bulan; 1 dokumen; 1 dokumen; 11 bulan	600,000,000	APBD		Bulan	807,500,000
2.02.2.02.01.21.03	Penyelenggaraan Fasilitas Posyandu	Terlaksananya lomba-lomba pada posyandu	Kota Bekasi	1 lomba	200,000,000	APBD		Lomba	483,220,000
2.02.2.02.01.21.01	Penyelenggaraan P2WKSS	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi KK binaan; Tersedianya perlengkapan penunjang pelatihan ketrampilan; pelatihan (TOT) ketrampilan bagi mkader P2WKSS; workshop ketrampilan dasar dan wirausaha; sosialisasi bagi 100 KK binaan	Kota Bekasi	100 KK; 72 unit; 5 pelatihan; 5 pelatihan; 1 lokasi, 100 KK	500,000,000	APBD		Pelatihan	526,000,000
2.2.16.9	Rencana Aksi Daerah (RAD), PUG, dan PHA	Tersedianya rencana kerja PUG, data dan rencana kerja PHA	Kota Bekasi	3 Dokumen	250,000,000	APBD		Dokumen	0
	JUMLAH				**7,054,100,000**				**10,312,720,000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih yaitu:

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan, maka diperlukan langkah-langkah pasti dengan program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua dan masyarakat berbasis teknologi informasi *(smart school)*;
4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Quran;

5. Penguatan system tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
6. Peningkatan kapasitas layanan system informasi kesehatan (perwujudan *smart health*);
7. Pengembangan wirausaha industry kreatif berbasis komunitas;
8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaran bursa tenaga kerja;
11. Pembentuka "*BEKASI CITY START-UP*" melalui kerjasama pengembangan incubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digitas untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;
13. Pengembangan "*urban tourism*" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "*Bekasi City Techno Park*";
15. Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event BEKASI CREATIVE" di tingkat kota dan kecamatan;
16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam bentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;

18. Pengembang system layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyadang masalah kesejahteraan sosial);
19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan public melalui Mal Pelayanan publik Kota Bekasi;
22. Pengembangan layanan publik berbasis IT;
23. Pengembangan system layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak sosial lainnya;
25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*);
27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll);
28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energy surya);
30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan Konversi "*Waste to Energy*";
31. Bedah rumah pada kawasan kumuh;
32. Pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman dan aktivitas usaha;
34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;
38. Peningkatan layanan penertiban akte kelahiran dan layanan administrasi pembangunan lainnya;
39. Penyediaan angkutan public massal;
40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
41. Pembangunan gedung *commuter transit parking* (stasiun KA dan LRT);
42. Pengenalan dan pemberlakukan *smart parking* di pusat perbelanjaan;
43. Pembangunan sarana transportasi *City Tourism*:
44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda; dan
45. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat*** dengan Program Prioritas
Ke ***Tiga puluh enam***.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki rencana kerja dengan total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 7.054.100.000,-** untuk tahun 2020 yang berasal dari APBD Kota Bekasi.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan berlandaskan pada Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengacu pada Visi dan Misi Kota Bekasi.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan diupayakan berjalan dengan maksimal sehingga harapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Walikota Bekasi pada umumnya bisa berjalan dengan secara optimal.

Mengingat akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki komitmen untuk bisa menjalankan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi.

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan, diantaranya :

- RPJMD
- RENSTRA
- IKU
- TAPKIN
- Rencana Kerja yang didalamnya terdapat program/kegiatan

Visi Wali Kota / Wakil Wali Kota terpilih yaitu:

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan, maka diperlukan langkah-langkah pasti dengan program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua dan masyarakat berbasis teknologi informasi *(smart school)*;
4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Quran;
5. Penguatan system tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;

6. Peningkatan kapasitas layanan system informasi kesehatan (perwujudan *smart health*);
7. Pengembangan wirausaha industry kreatif berbasis komunitas;
8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaran bursa tenaga kerja;
11. Pembentuka "*BEKASI CITY START-UP*" melalui kerjasama pengembangan incubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digitas untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;
13. Pengembangan "*urban tourism*" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "*Bekasi City Techno Park*";
15. Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event BEKASI CREATIVE" di tingkat kota dan kecamatan;
16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam bentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;
18. Pengembang system layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyadang masalah kesejahteraan sosial);
19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan public melalui Mal Pelayanan publik Kota Bekasi;
22. Pengembangan layanan publik berbasis IT;
23. Pengembangan system layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak sosial lainnya;
25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*);
27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll);
28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energy surya);
30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan Konversi "*Waste to Energy*";
31. Bedah rumah pada kawasan kumuh;
32. Pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman dan aktivitas usaha;
34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;

35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;
38. Peningkatan layanan penertiban akte kelahiran dan layanan administrasi pembangunan lainnya;
39. Penyediaan angkutan public massal;
40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
41. Pembangunan gedung *commuter transit parking* (stasiun KA dan LRT);
42. Pengenalan dan pemberlakukan *smart parking* di pusat perbelanjaan;
43. Pembangunan sarana transportasi *City Tourism*:
44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda; dan
45. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke ***empat*** dengan Program Prioritas Ke ***Tiga puluh enam*** dan ke ***Tiga puluh tujuh***.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki rencana kerja dengan total Dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** untuk tahun 2019 yang berasal dari APBD Kota Bekasi.

TABEL 4.1

TABEL ALUR VISI/MISI, PROGRAM PRIORITAS, SASARAN DAN KEGIATAN

TAHUN 2020

KOTA BEKASI

VISI KOTA BEKASI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN

MISI IV : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)	Rencana Tahun 2020 (N)		
			Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	-2	-4	-3	-5	-6	-7
2.02.2.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Kota Bekasi	**100%**	1,374,100,000	APBD

2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan telepon, air dan listrik	Kota Bekasi	72 line; 84 rek listrik; 12 line PAM	40,000,000	APBD
2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan dan bahan pembersih	Kota Bekasi	108 orang dan 9 jenis bahan pembersih	100,000,000	APBD
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Bekasi	53 jenis ATK	110,000,000	APBD
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Bekasi	12 jenis cetakan	100,000,000	APBD
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kota Bekasi	6 jenis komponen listrik	12,000,000	APBD

2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran)	Kota Bekasi	50 eksemplar	30,000,000	APBD
2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Bekasi	1000 dus	30,000,000	APBD
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Bekasi	45 orang	250,000,000	APBD
2.02.2.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga kontrak kerja	Kota Bekasi	156 orang	602,100,000	APBD
2.02.2.02.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya advetorial	Kota Bekasi	25 advetorial	100,000,000	APBD

2.02.2.02.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Optimalisasi Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**Kota Bekasi**	**100%**	**230,000,000**	**APBD**
2.02.2.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kota Bekasi	6 mobil dan 12 motor	200,000,000	APBD
2.02.2.02.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bekasi	60 unit	30,000,000	APBD
2.02.2.02.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Kota Bekasi**	**100%**	**50,000,000**	**APBD**
2.02.2.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pendidikan aparatur DP3A	Kota Bekasi	45 orang	50,000,000	APBD

	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	**Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan**	**Kota Bekasi**	**100%**	**900,000,000**	**APBD**
2.2.15.1	Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Pendampingan dan penanganan terhadap kasus anak	Kota Bekasi	180 Orang	500,000,000	APBD
1.12.1.12.01.15.00	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pendampingan terhadap kasus anak; pendampingan kasus anak oleh pengacara; penanganan pemulihan psikologis korban oleh psikolog; monitoring dan pembinaan korban/pelaku dan keluarga; Pelatihan trauma healing	Kota Bekasi	100 kasus; 20 kasus; 62 anak/kasus; 12 kecamatan; 1 paket	400,000,000	APBD
	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	**Tingkat Capaian Kota Layak Anak**	**Kota Bekasi**	**Nindya**	**1,250,000,000**	**APBD**
1.11.1.12.01.20	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	Terlaksananya pembekalan bagi pengurus forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; dan Terpenuhinya undangan peringatan dan keikutsertaan Kongres Anak Indonesia Tingkat Nasional	Kota Bekasi	24 orang tingkat kota, 48 orang tingkat kecamatan dan 168 tingkat kecamatan; 10 orang	150,000,000	APBD

1.11.1.12.01.20	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Terlaksananya pelatihan KHA bagi sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, PAUD Holistik, Kader BKB, Kader BKR, Kader posyandu, pengurus rumah pintar dan motekar	Kota Bekasi	150 orang	-	APBD
1.11.1.12.01.20	Peningkatan Kompetensi Masyarakat Melalui Parenting	Terlaksananya pelatihan parenting bagi kader Posyandu, Kader BKB, Kader BKR, dan Kader PKK	Kota Bekasi	150 orang	-	APBD
1.11.1.12.01.20.06	Pengembangan Dan Implementasi 5 Klaster Kota Layak Anak	Terselenggaranya verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Pusat; Terselenggaranya rapat koordinasi tim gugus tugas Kota Layak Anak	Kota Bekasi	1 event; 2 kali	250,000,000	APBD
1.11.1.12.01.20.06	Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Kota Layak Anak	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kota Layak Anak; Tersusunya pelaporan Kota Layak Anak Tahun 2020	Kota Bekasi	12 Kecamatan; 1 dokumen	-	APBD
1.11.1.12.01.20.06	Lomba Kota Layak Anak	Terselenggaran lomba Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Pintar KLA, Kecamatan Layak Anak dan Forum Anak	Kota Bekasi	5 Event	-	APBD

1.11.1.12.01.20.06	Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021	Terlaksananya peringatan HAN Kota Bekasi Tahun 2021; Terpenuhinya Undangan HAN Tingkat Provinsi dan Nasional	Kota Bekasi	500 orang; 2 event	-	APBD
1.11.1.12.01.20.12	Jambore Forum Anak Kota Bekasi	Terlaksananya Jambore Pengurus Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Kota Bekasi	24 orang tingkat kota, 24 orang tingkat kecamatan dan 112 tingkat kecamatan	-	APBD
1.11.1.12.01.20.06	Pengadaan Sarana KIE (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi) Kota Layak Anak	Terpasangnya spanduk, baliho, dan banner sebagai sarana KIE Kota Layak Anak; Tersedianya sarana fasilitas ruang menyusui dan taman bermain anak	Kota Bekasi	12 kecamatan; 80 lokasi	-	APBD
2.02.2.02.01.18.12	Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Terlaksananya sosialisasi pembentukan dan pembinaan PUSPAGA	Kota Bekasi	150 orang/1 kali	200,000,000	APBD
2.02.2.02.01.18.02	Biaya Operasional Dan Sarana Pendukung Tempat Peniti[an Anak (TPA)	Tersedianya sarana prasarana dan biaya operasional TPA	Kota Bekasi	1 paket/1 tahun	350,000,000	APBD

2.02.2.02.01.18.05	Pengadaan Sarana Pendukung Kota Layak Anak	Tersedianya Prasarana Kampung Ramah Anak, sarana rumah pintar, prasarana sekretariat forum anak Tingkat Kota Bekasi dan prasarana rumah pintar	Kota Bekasi	1 paket; 3 rumah pintar;2 unit;14 unit	300,000,000	APBD
	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus.	**Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan**	**Kota Bekasi**	**100%**	**650,000,000**	**APBD**
2.02.2.02.01.19.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Terlaksananya pendampingan kasus KDRT; Terlaksananya pertemuan rutin; Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan bagi ASN dan Non ASN; Trauma Healing bagi pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan; pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Kota Bekasi	65 Kasus; 90 orang; 120 orang; 120 orang; 40 orang; 40 orang	500,000,000	APBD
2.02.2.02.01.19.02	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terlaksananya sewa rumah aman	Kota Bekasi	1 unit	150,000,000	APBD
	Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak	**Persentase Ketersediaan Data Gender Dan Anak**	**Kota Bekasi**	**100%**	**100,000,000**	**APBD**
1.11.1.12.01.20	Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak	Tersosialisasinya Tesa di sekolah Kota Bekasi; Terpenuhinya Psikolog Telepon Pengaduan	Kota Bekasi	750 peserta; 2 orang/12 bulan	100,000,000	APBD

	Program Pemberdayaan Perempuan	**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Kota Bekasi**	**49%**	**2,500,000,000**	**APBD**
2.02.2.02.01.15.07	Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Pelaku Usaha	Terbentuknya kelompok PEKKA di kelurahan; Pembinaan dan monev perempuan pelaku usaha; Terselenggaranya pelatihan perempuan pelaku usaha	Kota Bekasi	4 kelompok; 12 kecamatan; 175 orang	300,000,000	APBD
2.02.2.02.01.21.11	TOT Fasilitator dan Gender Champion	Terselenggarakannya rangkaian kegiatan pelatihan fasilitator dan gender champion	Kota Bekasi	135 orang	-	APBD
2.02.2.02.01.15.05	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Terselenggaranya rangkaian kegiatan dan dukungan penilaian APE tahun 2021 di Kota Bekasi, Terlaksananya kegiatan bimtekPPRG; Bimbingan tehnis PUG; Rapat koordinasi forum PUSPA; Tersedianya pedoman PUG Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 kegiatan; 1 kegiatan; 100 orang; 75 orang; 1 dokumen	150,000,000	APBD
2.02.2.02.01.21.03	Pembinaan Organisasi Wanita	Pertemuan rutin GOW; Seminar Perempuan politik; Lomba Perempuan Inspiratif; Seminar dalam rangka Hari Kartini; Pertemuan rutin DWP; Pengajian rutin DWP; Seminar dalam rangka Hari Ibu; Pelatihan public speaking	Kota Bekasi	11 kali; 2 kali; 12 kecamatan; 1 kali;11 kali; 11 kali; 1 kali; 3 kalii	250,000,000	APBD
2.02.2.02.01.15.08	Penyelenggaraan Sekoper Cinta	Sosialisasi Sekoper Cinta Tingkat Kecamatan; TOT Sekoper Cinta; Penyelenggaraan Sekolah Sekoper Cinta	Kota Bekasi	12 kecamatan; 30 orang; 6 kecamatan	250,000,000	APBD

2.02.2.02.01.21.02	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Operasional pengurus PKK Tingkat Kota; Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan PKK Tahun 2020; Penyusunan rencana kegiatan PKK Tahun 2021	Kota Bekasi	12 Bulan; 1 dokumen; 1 dokumen; 11 bulan	600,000,000	APBD
2.02.2.02.01.21.03	Penyelenggaraan Fasilitas Posyandu	Terlaksananya lomba-lomba pada posyandu	Kota Bekasi	1 lomba	200,000,000	APBD
2.02.2.02.01.21.01	Penyelenggaraan P2WKSS	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi KK binaan; Tersedianya perlengkapan penunjang pelatihan ketrampilan; pelatihan (TOT) ketrampilan bagi mkader P2WKSS; workshop ketrampilan dasar dan wirausaha; sosialisasi bagi 100 KK binaan	Kota Bekasi	100 KK; 72 unit; 5 pelatihan; 5 pelatihan; 1 lokasi, 100 KK	500,000,000	APBD
2.2.16.9	Rencana Aksi Daerah (RAD), PUG, dan PHA	Tersedianya rencana kerja PUG, data dan rencana kerja PHA	Kota Bekasi	3 Dokumen	250,000,000	APBD
	JUMLAH				**7,054,100,000**	

Demikian Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dari kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien serta berjalan secara sistematis. Agar rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mencapai target kegiatan diperlukan dukungan anggaran dari APBD dan APBN.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

Ir. Hj. RISWANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601119 199203 2 002